

KERUSUHAN MEI 1997 DI BANJARMASIN: DINAMIKA SOSIAL PADA AKHIR KEKUASAAN ORDE BARU

Muhammad Ihsan Hafidz¹, Fauziah Faisal Puteri², Francesco Tavlaridis Wijaya³,
Nur Aini Az Zahra⁴, Depi Prahesti⁵

¹⁻⁵Universitas Lambung Mangkurat

¹muhammadihsanhafidz@gmail.com, ²puterifauziah2@gmail.com,

³francescowijaya7@gmail.com, ⁴2310111220008@mhs.ulm.ac.id,

⁵prahestidepi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the impact of the 1997 Banjarmasin Riots on the state of infrastructure in the city of Banjarmasin. The study employs a historical method involving the stages of source collection, source criticism, interpretation, and historical writing. Data was obtained from various sources such as books, academic journals, archives, and newspaper articles relevant to the events. The research findings indicate that the 1997 riots caused significant damage to various city infrastructures, particularly to commercial centers, retail stores, commercial buildings, and public facilities. Additionally, the riots disrupted city services and the socio-economic activities of the community. The impact of this infrastructure damage was not merely physical but also affected the economic and social lives of the community over a considerable period. This study confirms that social conflict has multidimensional impacts encompassing social, economic, and physical aspects of the region. Therefore, social stability is a crucial factor in supporting the sustainability of urban development and preventing more extensive damage in the future.

Keywords: 1997 Banjarmasin Riots, Social conflict, Urban infrastructure, Impact of riots, and Local history.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin sebagai bagian dari dinamika sosial pada akhir masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini tidak hanya dipicu oleh ketegangan politik saat kampanye Pemilu 1997, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti kesenjangan, praktik KKN, dan krisis moneter yang melanda Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusuhan dipicu oleh akumulasi ketidakpuasan masyarakat yang kemudian meledak akibat insiden saat pelaksanaan ibadah salat Jumat. Kerusuhan ini menimbulkan dampak besar berupa kerugian material, korban jiwa, serta trauma sosial yang mendalam. Kajian ini menegaskan pentingnya

memahami konflik sosial sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan situasional.

Kata Kunci : Kerusuhan Banjarmasin 1997, Orde Baru, konflik sosial, krisis moneter, dinamika masyarakat, Pemilu 1997.

A. Pendahuluan

Kerusuhan sosial merupakan salah satu fenomena yang sering muncul dalam kondisi masyarakat yang mengalami tekanan politik, ekonomi, dan sosial secara bersamaan (Murtamadji, 2006). Dalam konteks Indonesia, peristiwa kerusuhan yang terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru menjadi refleksi nyata dari akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang otoriter dan tidak responsif (Farchan, 2022). Salah satu peristiwa penting tersebut adalah Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin, yang tidak hanya menjadi catatan sejarah lokal, tetapi juga bagian dari dinamika nasional yang menandai krisis multidimensional di Indonesia.

Peran rakyat yang terbatas pada masa Orde Baru membuat pemerintah banyak melakukan berbagai penyimpangan, hal tersebut sangat terasa saat masa akhir dari Orde Baru. Praktik KKN terasa mulai dari satuan unit pemerintah terkecil

hingga ke pusat, ditambah dengan krisis moneter yang terjadi pada 1997 membuat pemerintah mendapat kritikan yang tajam dari rakyat (Sunardi dkk, 2024). Keadaan negara yang tak stabil pada awal masa krisis serta berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kondisi rakyat membuat krisis kepercayaan kepada pemerintah semakin terasa kuat (Tarmidi, 1999). Pemilu yang diharapkan menjadi solusi bagi jalannya pemerintahan yang sesuai dengan demokrasi hanya dianggap formalitas oleh rakyat (Hikam, 1999). Hal tersebut terjadi lantaran Golkar terlalu dominan dalam panggung politik dan kehadirannya sangat erat dengan kepentingan pemerintah yang berkuasa (Azwar, 2008 dalam Perdana, 2021:33; Hidayat, 2018).

Pemilu 1997 merupakan pemilu yang paling tidak damai dalam sejarah pemilu di masa Orde Baru (Rumyati, 2023). Meskipun Golkar mendapatkan jumlah suara lebih besar dibandingkan pemilu sebelumnya,

nahasnya Pemilu 1997 ini merupakan Pemilu terakhir bagi rezim Orde Baru. Pada tahun tersebut Indonesia mengalami krisis berkepanjangan dan praktik KKN pejabat pemerintah yang berakibat memburuknya keuangan negara sehingga menciptakan kemarahan bagi masyarakat dan mahasiswa (Majid & Sugitanata, 2021 dalam Rizkinta dkk, 2025:75; Yanuarti, 2018).

Kerusuhan yang terjadi di Banjarmasin pada bulan Mei tahun 1997 adalah momen penting dalam sejarah lokal yang tidak bisa dipisahkan dari keadaan nasional pada akhir era pemerintahan Soeharto. Insiden ini berlangsung di tengah situasi politik di era Orde Baru yang mulai mendapatkan tekanan, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Selama lebih dari tiga puluh tahun, rezim Orde Baru dikenal karena kestabilan politik yang kuat, tetapi kestabilan itu sering kali dicapai melalui kontrol yang ketat terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Dalam situasi seperti itu, potensi konflik yang ada di masyarakat biasanya tidak dapat diekspresikan secara langsung. Kerusuhan yang berlangsung di Banjarmasin pada bulan Mei 1997

awalnya disebabkan oleh ketegangan yang muncul saat kampanye pemilihan umum (Sulistyo, 1999). Namun, insiden ini kemudian berkembang menjadi sebuah konflik sosial yang melibatkan banyak lapisan masyarakat, mengakibatkan kerusakan serta kehilangan nyawa. Ini menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya disebabkan oleh aspek politik yang praktis, tetapi juga terkait dengan dinamika sosial yang lebih rumit, seperti ketidakadilan sosial, perasaan kelompok, dan lemahnya sistem penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Pentingnya kajian tentang Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin penting untuk memahami dinamika sosial masyarakat pada periode transisi menuju runtuhnya Orde Baru. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai faktor yang mendasari kerusuhan, serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Kajian ini juga relevan sebagai sebuah refleksi untuk memahami potensi konflik sosial saat ini agar dapat dikelola dengan lebih baik di masa depan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai desain utama dalam proses pengkajian dan analisis literatur. SLR merupakan suatu cara identifikasi, evaluasi, dan interpretasi semua ketersediaan penelitian yang relevan terhadap rumusan masalah atau area topik yang diteliti. Lebih lanjut, SLR didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai, dan menafsirkan semua bukti penelitian yang tersedia dengan tujuan untuk menyediakan jawaban atas pertanyaan penelitian secara spesifik dan terstruktur. Desain penelitian ini dipilih karena SLR memungkinkan peneliti untuk melakukan sintesis bukti secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dibandingkan tinjauan literatur naratif konvensional. Pendekatan ini dinilai tepat untuk menjawab tujuan penelitian yang memerlukan pemetaan dan analisis menyeluruh terhadap studi-studi yang telah ada sebelumnya mengenai Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin dalam konteks dinamika sosial pada akhir kekuasaan Orde Baru.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui

penelusuran literatur secara sistematis pada berbagai basis data akademik yang relevan, antara lain Google Scholar, Garuda (Portal Jurnal Indonesia), JSTOR, serta repositori institusi perguruan tinggi di Indonesia. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci utama dan turunannya, yaitu: "Kerusuhan Banjarmasin 1997", "Kerusuhan Mei 1997", "Orde Baru", "dinamika sosial Kalimantan Selatan", "kekerasan massa Indonesia", "konflik sosial Orde Baru", serta "transisi politik Indonesia 1990-an". Kombinasi kata kunci tersebut digunakan secara bergantian guna memastikan cakupan literatur yang komprehensif dan tidak melewatkan sumber-sumber yang relevan.

Jenis literatur yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen sejarah dan arsip yang berkaitan dengan topik kajian. Literatur yang dikumpulkan dapat berbahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, dengan rentang waktu publikasi yang tidak dibatasi secara ketat, namun diprioritaskan pada sumber-sumber yang diterbitkan sejak tahun 1997 hingga saat ini guna

memperoleh gambaran historiografis yang memadai.

Seleksi literatur dilakukan berdasarkan penetapan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: (1) literatur yang secara langsung membahas peristiwa Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin; (2) literatur yang mengkaji konteks sosial, ekonomi, dan politik pada masa Orde Baru, khususnya pada periode 1990-an; (3) literatur yang membahas dinamika konflik sosial, kekerasan massa, dan gerakan sosial di Indonesia; serta (4) literatur yang menganalisis faktor-faktor struktural yang berkontribusi terhadap instabilitas sosial menjelang runtuhnya Orde Baru. Sebaliknya, literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian, tidak dapat diakses secara penuh, atau tidak memenuhi standar kelayakan akademik akan dieksklusi dari proses analisis.

Seluruh literatur yang telah lolos tahap seleksi kemudian ditelaah secara mendalam dan disintesis menggunakan analisis tematik. Proses sintesis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola yang berulang, serta

celah-celah kajian yang ditemukan dalam literatur yang ada. Hasil sintesis tematik tersebut selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika sosial yang melatarbelakangi, memicu, dan membentuk Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin sebagai bagian dari pergolakan besar pada akhir kekuasaan Orde Baru di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Selama pemerintahan Orde Baru, khususnya Kota Banjarmasin yang diketahui tidak pernah tercatat adanya konflik atau kerusuhan massal (Suwaryati, 2003). Bahkan aksi demonstrasi mahasiswa dan kritikan serta protes terhadap kebijakan pemerintah ketika itu, dari berbagai kalangan baik itu mahasiswa, LSM, buruh dan gerakan berbau rasial ataupun bersifat SARA yang hingga menjadi perhatian nasional hampir tidak pernah ada. Kota Banjarmasin yang dikenal adalah merupakan kota dengan image yang harmoni dan stabil. Jika pun ada kerusuhan, itu hanya bersekala kecil dan sebatas ketegangan saja. Sehingga peristiwa “Jum’at Kelabu” yang terjadi tahun 1997 yang skalanya cukup besar

tersebut benar-benar mengejutkan dan meninggalkan stigma buruk di kalangan masyarakat Banjarmasin (Khotimah, 2017:244).

Sebelum terlaksananya pemilu tahun 1997, beberapa pemicu keresahan masyarakat Banjar telah muncul. *Structural conduciveness* yang dibuktikan dengan adanya penguasaan sumber daya alam oleh golongan tertentu makin dipertajam. Selain itu, tampak terlihat dengan berdirinya plasa, mal, swalayan, serta hotel menyebabkan tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dampak pembangunan kota dan lain-lain. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan ekonomi yang terus memanas (Khairunnisa dkk, 2023) hingga ketika pecahnya kerusuhan (Salim & Achdian, 1997 dalam Rosalina dkk, 2022:36).

Kejadian yang sama sekali tidak pernah ada yang menduga tersebut bermula dengan kampanye putaran terakhir bagi partai Golkar yang jatuh pada hari Jum'at. Menurut rencana kegiatan kampanye Partai Golkar di Banjarmasin dilaksanakan besar-besaran dan dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Drs. H. Sya'dillah Mursyid, MPA dan K.H. Hassan Basri,

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Kerusuhan berawal ketika massa Golkar berpawai menuju tempat kampanye di Lapangan di Jalan Kamboja melewati jalan di depan Masjid Noor yang biasa ditutup karena digunakan oleh sebagian jemaah sholat yang berada di luar Masjid. Raungan suara sepeda motor yang melintasi jalan di saat jemaah belum selesai melaksanakan shalat Jumat memicu kemarahan warga. Warga yang merasa dilecehkan serta merta menyerbu dan mengejar yang berpawai, membubarkan mereka yang berkumpul di lapangan Kamboja dan membakar atribut Golkar. Peserta kampanye tidak peduli laki-laki atau perempuan yang mengenakan baju atau kaos kuning, dipaksa melepaskan pakaiannya dibawah ancaman senjata tajam, seperti clurit, golok dan sebagainya. Setelah mporak-porandakan peserta kampanye, massa yang brutal dan tak terkendali mengalihkan sasarannya kepada bangunan kantor, rumah ibadah, toko, tempat hiburan, hotel dan sebagainya. Mereka melempari kaca-kaca, membakar mobil dan bangunan serta menjarah isi toko dan supermarket. Kejadian berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan pukul

20.00 wita, dan selama itu pihak keamanan seakan tak berdaya (Ideham, 2003:661).

Hal ini juga selaras dengan penelitian Rosalina dkk (2022:36) bahwa percikan emosi amarah telah bermula antar para jemaah yang di antaranya termasuk para simpatisan OPP lain dengan simpatisan Golkar. Hal ini dianggap tidak etis dan tidak memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga perkelahian pun merambah menjadi skala yang besar menjadi riuh massa. Massa kini tak hanya meluapkan emosi marah saja, namun mereka juga membawa senjata tajam sehingga membuat suasana makin bersitegang. Hal ini menunjukkan tahap *Structural strain* (Smelser, 1962). Amukan massa meningkat terlebih lagi ketika telah tersebar bahwa simpatisan Golkar yang memulai pertikaian dengan mengganggu ibadah salat jumat. Massa mengancam dan melepas paksa seseorang yang mengenakan atribut Golkar, Selain itu mereka juga merusak kantor DPD I Golkar. Semua hal yang berhubungan dengan partai Golkar maka akan dirusak massa. Hal ini menunjukkan bahwa adanya *Growth and spread of generalized belief* (Smelser, 1962).

Peristiwa yang bermula di Masjid Noor itu kemudian menyebar di sebagian kota dan massa berdatangan dari penjuru kota, seperti jamaah Masjid Agung, Masjid Kampung Melayu dan Pasar Lama. Akibat bentrok yang terjadi di Masjid Noor, Satgas Partai Golkar yang terdesak kemudian melarikan diri ke Kantor DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan yang berada di Jalan Lambung Mangkurat, sekitar 1 km dari Masjid Noor. Massa terus mengejar dan terjadi saling melempar batu kedua kubu (massa dan simpatisan Partai Golkar). Akhirnya simpatisan dan Satgas Partai Golkar, yang rata-rata berasal dari organisasi Pemuda Pancasila dan FKPPi ini melarikan diri. Karena massa terlalu banyak kemudian membakar lima mobil peserta kampanye Partai Golkar. Setelah massa membakar mobil, kini giliran massa membakar bagian depan Kantor DPD Partai Golkar tersebut beserta hadiah-hadiah yang akan dibagikan ketika penutupan kampanye. Massa mengambil alih kantor tersebut dengan menurunkan bendera Partai Golkar dan menggantinya dengan menaikkan bendera hijau (Salim dan Achdian,

tanpa tahun dalam Khotimah, 2017:251).

Merujuk pada teori deprivasi relatif yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr, apabila terjadi kesenjangan antara ekspektasi yang diharapkan dengan kapasitas atau nilai yang dimiliki, maka kekerasan dan kerusuhan menjadi suatu keniscayaan yang akan terjadi dalam suatu kelompok masyarakat maupun individu. Semakin besar ketidakpuasan yang dialami, maka semakin meningkat pula kemungkinan terjadinya tindak kekerasan (Gurr, 1970). Begitu pula yang terjadi di Banjarmasin ketika dalam kondisi ekonomi yang menuju krisis pada 1997 (Sari & Fakhrudin, 2016), massa terpancing dengan perilaku peserta kampanye dari entitas politik yang hingga saat itu menjadi penguasa pemerintahan. Di tengah situasi yang mulai sulit secara ekonomi, adanya tindakan-tindakan yang dapat memancing amarah massa tentu saja membuat aksi kekerasan menjadi sesuatu yang sulit dihindari. Apalagi dengan kondisi bahwa mereka yang dianggap sebagai penyulut kemarahan berasal dari kelompok yang sedang dominan atau berkuasa. Kemarahan yang

dipantik oleh beberapa anggota massa kampanye ini berubah menjadi amarah yang meluas kepada seluruh peserta kampanye Golkar. Siapapun yang mengenakan atribut Golkar yang identik dengan warna kuning tersebut diminta untuk melepaskannya. Dengan berbekal senjata tajam, kelompok yang marah ini kemudian melakukan tindakan represif terhadap para peserta kampanye. Setelah mengejar dan menyerang massa kampanye, kelompok yang marah ini kemudian melakukan penyerangan terhadap bangunan pertokoan, perkantoran, hingga rumah ibadah. Kampanye urung terlaksana karena situasi benar-benar tidak kondusif dan tidak terkendali seiring eskalasi kerusuhan yang semakin membesar (Alfarius dkk, 2026:50).

Pada hari Senin, 13 April 2026, kami pergi ke lokasi Mitra Plaza yang menjadi salah satu tempat yang paling terdampak dari kerusuhan Mei 1997. Menurut pengakuan Saudara S (Nama singkatan), seorang pedagang tas yang kami wawancari yang sudah berjualan di Mitra Plaza sejak tahun 1990, beliau menyaksikan secara langsung peristiwa kerusuhan sekaligus penjarahan oleh demonstran pada bulan Mei tahun

1997. Beliau sempat menutup toko dan bersembunyi sambil melihat keadaan. Beliau menyaksikan secara langsung segerombolan demonstran yang mencabuti bendera Partai Golongan Karya pada siang hari. Beliau sempat melihat pawai demonstran Golkar. Beliau mengira bahwa kerusuhan akan mereda saat sore hari, namun ternyata kerusuhan masih berlanjut dan terlihat semakin mendekati Mitra Plaza sehingga beliau memutuskan untuk menutup tokonya kembali dan bersembunyi di wc belakang Mitra Plaza. Pada pukul 20.00 WITA, beliau kembali melihat keadaan dan ternyata kondisi di sekitar sudah mulai aman. Namun karena masih belum berani untuk pulang, beliau memutuskan untuk menginap di Hotel Rahmat yang terletak di KM 1 Jalan Ahmad Yani dengan jalan kaki melewati Kampung Gadang, Ujung Murung. Pada pukul 22.00 WITA, Beliau naik ke atas Hotel Rahmat dan melihat banyak bangunan yang terbakar akibat dari kerusuhan. Baru keesokan harinya beliau pulang ke rumah dengan berjalan kaki.

Beberapa hari kemudian beliau memutuskan untuk kembali ke Mitra Plaza untuk mengecek keadaan toko.

Saat sampai di lokasi, ternyata Toko Sepatu Bata tepat di sebelah toko beliau sudah hangus terbakar. Untungnya toko Pak S tidak dijarah dan tidak mengalami kerusakan yang parah, namun ada beberapa barang di toko beliau yang rusak karena terkena panas dari toko sebelah yang terbakar. Menurut keterangan Pak S, lantai 2 menjadi tempat yang paling parah mengalami kerusakan. Beliau berpendapat bahwa kerusuhan ini berdampak pada pedagang yang menjadi korban ketika berjualan di Mitra Plaza. Banyak toko yang rusak dan dijarah sehingga para pedagang mengalami kerugian yang besar.

Kerusuhan Jumat Kelabu itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian dari segi harta benda tercatat: mobil (21 terbakar, 12 rusak), sepeda motor (60 terbakar, 4 rusak), kantor, instansi pemerintah, bank 12 terbakar/rusak, pertokoan dan tempat hiburan 10 terbakar/rusak, tempat ibadah 5 terbakar/rusak, dan beberapa sekolah, panti jombo serta rumah penduduk terbakar, sehingga sekitar 400 kepala keluarga kehilangan tempat berteduh dan sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Disamping itu, korban jiwa juga tidak sedikit. Tercatat yang

meninggal (135 orang), hilang (164 orang), luka-luka (lebih 100 orang). Belum termasuk mereka yang ditahan sebanyak 304 orang untuk menunggu proses selanjutnya. Banyaknya selisih antara jumlah korban yang meninggal atau korban yang dilaporkan hilang itu terjadi karena korban yang meninggal sebagian besar tidak dapat lagi dikenali karena hangus terbakar (Ideham, 2003:659).

Sejak siang itu, Banjarmasin benar-benar luluh lantak oleh kerusuhan. Suasana mencekam meliputi seantero kota yang lumpuh oleh karena bentrokan antar kelompok pendukung partai politik ini. Data resmi mencatat bahwa 123 orang tewas menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari segi material, satu buah gereja musnah dan 10 lainnya rusak berat. Kerusakan berat lainnya terjadi pada rumah (151 buah), toko (144), pusat perbelanjaan (3), swalayan (3), bank (5), kantor pemerintahan (4), hiburan (1), sekolah (3), panti jompo (1), dan apotik (1). Termasuk pula 36 mobil dan 34 sepeda motor musnah dibakar dalam kerusuhan ini (Salim dan Achdian, 1997 dalam Alfarius dkk, 2026:50).

Setelah semua korban tewas yang ditemukan ada sekitar 120 mayat tersebut kemudian disemayangkan di Rumah Sakit Ulin. Dengan dibantu oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Banjarmasin mayat-mayat tersebut diberangkatkan dengan 5 mobil jenazah dan dimakamkan massal pada hari Sabtu sekitar pukul 17.00 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) milik Pemda Kotamadya Banjarmasin di Jalan Bumi Selamat, KM. 22 Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar. Jarak antara lokasi kejadian dan penguburan massal kurang lebih ditempuh dalam waktu 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Sehari sebelum pemakaman, 3 jenazah yang masih dapat teridentifikasi, diambil oleh keluarga korban dan sisanya dimakamkan secara massal. Para korban kerusuhan tersebut dimakamkan secara Islam dan adat. Jenazah-jenazah dimandikan, dikafani dan dishalatkan di kamar jenazah sebelum dimakamkan. Dua diantara jenazah tersebut menggunakan peti dan sisanya menggunakan kain kafan. Setelah dimakamkan dilakukan

tahlilan selama 3 hari (Khotimah, 2017:254).

D. Kesimpulan

Kerusuhan Mei 1997 di Banjarmasin merupakan peristiwa sosial yang dipicu oleh kombinasi faktor politik, ekonomi, dan sosial pada akhir masa Orde Baru. Ketegangan yang muncul saat kampanye Pemilu 1997 menjadi pemicu langsung, namun akar permasalahan sebenarnya terletak pada ketidakpuasan masyarakat akibat kesenjangan sosial, praktik KKN, serta dampak krisis ekonomi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik sosial tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai tekanan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dampak kerusuhan sangat besar, baik dari segi korban jiwa, kerusakan material, maupun trauma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan konflik, keadilan sosial, serta pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

Alfarius, W., Rahayu, R., Effendi, R., Yahya, D., Susanto, H., & Akmal, H. Bertahan melewati krisis: Etnis Tionghoa pasca kerusuhan 23 Mei 1997 di Banjarmasin. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 9(1).

Azwar, R. C. (2008). Partai Golkar di tiga era. Depok: Penerbit Universitas Indonesia.

Farchan, Y. (2022). Dinamika sistem politik otoritarianisme Orde Baru. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 152–161.

Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*. New Jersey: Princeton University Press.

Hidayat, A. (2018). Perkembangan partai politik pada masa Orde Baru (1966-1998). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 17(2), 155–164.

Hikam, M. A. (1999). *Islam, demokratisasi, dan pemberdayaan civil society*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ideham, S., et al. (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan

DAFTAR PUSTAKA

- Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ilmu Sejarah dan Pendidikan, 9(1).
- Khairunnisa, E., Maisyaroh, D., & Putri, K. T. (2023). Analisis kebijakan moneter terhadap krisis moneter 1997-1998 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 75–83.
- Khotimah, H. (2017). Collective memory “Jum’at Kelabu” di Banjarmasin (perspektif resolusi konflik atas peristiwa 23 Mei 1997). *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(2), 235–276.
- Murtamadji. (2006). Konflik dan tindak kekerasan di era pasca Orde Baru serta upaya menumbuhkan integrasi nasional di Indonesia. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 6(1).
- Perdana, H. A. (2021). Gejolak politik saat pelaksanaan Pemilu 1997 pada akhir pemerintahan Orde Baru. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, 1(1).
- Rizkinta, B., Baihaqi, A. F., & Ramadhan, F. S. (2025). Krisis politik dan pandangan ekonomi menjelang Pemilu 1997. *Jurnal*
- Rosalina, R., Prawitasari, M., Rochgiyanti, R., & Anis, M. Z. A. (2022). Trauma emosional yang dialami masyarakat Banjar pasca peristiwa Jum’at Kelabu. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 2(1), 33–42.
- Rumyati, R. (2023). Evolusi sistem pemilu masa Orde Baru (1966-1998). *KALA MANCA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 23–30.
- Sari, P. K., & Fakhruddin. (2016). Identifikasi penyebab krisis moneter dan kebijakan bank sentral di Indonesia: Kasus krisis tahun 1997-1998 dan 2008. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Smelser, N. J. (1962). *Theory of Collective Behavior*. New York: Free Press.
- Sulistyo, H. (1999). *Anarki enam jam: Rekonstruksi kerusuhan Jumat membara di Banjarmasin. Dalam Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Sunardi, A., Nur Afiah, W., Nuranisya Fadlah, S., & Ribawati, E. (2024). Krisis moneter 1997-1998: Akar penyebab, dampak ekonomi, dan kebijakan penanganan di Indonesia. Sindoro: Cendikia Pendidikan, 5(7), 21–30.
- Suwaryati, T. (2003). Konflik-konflik sosial bernuansa agama di berbagai komunitas: Kasus kerusuhan sosial di Banjarmasin, 1997. Dalam Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 1(4), 1–25.
- Yanuarti, S. (2018). Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 15(2), 233.